

Intiland Gelar Topping Off Apartemen Fifty Seven Promenade

“Topping off menjadi milestone atau pencapaian penting dalam tahapan pengembangan dalam rangka memenuhi harapan para konsumen yang mempercayakan investasinya kepada kami,” kata Permadi Indra Yoga.

JAKARTA (IM) - Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland;DILD) berhasil menyelesaikan tahapan pembangunan struktur utama tower City apartemen Fifty Seven Promenade yang berlokasi di kawasan pusat bisnis MH Thamrin, Jakarta Pusat. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan penutupan atap (topping off) oleh jajaran manajemen perseroan dan pihak kontraktor, Rabu (31/3/2021).

Direktur Pengembangan Bisnis Intiland, Permadi Indra Yoga menyatakan, fokus perseroan saat ini memfokuskan investasi jangka panjang konsumen di Fifty Seven Promenade terjaga dengan baik. “Meski di masa pandemi Covid-19, kami terus berupaya

maksimal untuk segera menyelesaikan pembangunan apartemen Fifty Seven Promenade. Topping off menjadi milestone atau pencapaian penting dalam tahapan pengembangan dalam rangka memenuhi harapan para konsumen yang mempercayakan investasinya kepada kami” kata Permadi Indra Yoga dalam konferensi pers, di Jakarta Rabu (31/3).

Fifty Seven Promenade merupakan pengembangan proyek pengembangan mixed-use and high rise yang berlokasi di kawasan pusat bisnis MH Thamrin, Jakarta Pusat. Menempati area seluas 3,2 hektar, pengembangan Fifty Seven Promenade terbagi ke dalam dua tahapan.

Pengembangan tahap pertama menempati area seluas



TOPPING OFF APARTEMEN FIFTY SEVEN PROMENADE: (ki-ka) Direktur Pengembangan Bisnis PT Intiland Development Tbk Permadi Indra Yoga, Direktur PT Raharja Mitra Familia Tjenharto Kohar, Wakil Direktur Utama dan COO Intiland Utama Gondokusumo, Direktur Utama PT Nusa Raya Cipta Hadi Winarto, Pimpinan Proyek Fifty Seven Promenade Trijas Hwe dan Construction Management Leader Joo Byeong Seon melakukan prosesi penutupan atap tower City57 Apartemen Fifty Seven Promenade di MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (31/3).

1,3 hektar yang meliputi pembangunan dua tower apartemen yakni City57 setinggi 24

lantai dan Sky57 setinggi 49 lantai. Sementara pengembangan tahap kedua terdiri dari satu tower apartemen, satu tower perkantoran, dan fasilitas ritel promenade.

“Saat ini konstruksi tower Sky57 terus kami kebut agar tetap sesuai target. Kami proyeksikan dalam beberapa bulan pekerjaan konstruksi akan selesai, sehingga topping off tower Sky57 bisa dilakukan bulan Agustus 2021,” ujarnya optimis.

Pengembangan tahap pertama merupakan hasil kolaborasi strategis antara Perseroan dengan Government of Singapore Investment Corporation (GIC), sebuah lembaga pengelola cadangan devisa negara Singapura.

Menurut Pimpinan Proyek Fifty Seven Promenade Trijas Hwe, Perseroan optimistik proses pembangunan apartemen Fifty Seven Promenade

berjalan lancar, meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19. Perseroan terus berusaha secara maksimal untuk menjaga target progres pembangunan bisa tercapai.

Trijas Hwe menjelaskan, sesuai dengan rencana pengembangan, pekerjaan pembangunan apartemen Fifty Seven Promenade akan selesai pada triwulan ketiga tahun 2022. Perseroan kemudian akan melakukan proses serah terima unit ke konsumen mulai triwulan IV tahun 2022.

“Progres pembangunan masih sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan tepat waktu, sehingga konsumen bisa segera menikmati apartemen ini” ujar Trijas Hwe. • vit



Apartemen Fifty Seven Promenade, di kawasan pusat bisnis MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Paripurna Laporan Reses I Tahun 2021 DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI (IM) - Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi pada Kamis, 18 Maret 2021 yang lalu dengan agenda rapat yang semula adalah Penyampaian Laporan Pansus 7 DPRD Kota Bekasi, Penyampaian Laporan Hasil Reses I DPRD Kota Bekasi Tahun 2021, Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi dan Penandatanganan Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi tentang Persetujuan Raperda menjadi Perda Kota Bekasi tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Sehubungan dengan tidak hadirnya Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat itu yang dikabarkan sedang sakit dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Dr. Reny Hendrawati, MM sehingga dia kemudian mewakili Pemerintah Kota Bekasi.

Meskipun Rapat Paripurna tersebut sempat diskor selama 10 menit, namun tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan yaitu merubah beberapa agenda rapat yakni menunda Penandatanganan Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi tentang Persetujuan Raperda menjadi Perda Kota Bekasi tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Syaifuddin, A.Md, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan III TA. 2020 pada Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam Laporan tersebut Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

-Pemerintah Kota Bekasi agar menempatkan SDM

aparatur sesuai dengan kompetensinya guna mendorong optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah.

-Perlu dilakukan pengawasan internal secara berkesinambungan oleh pihak inspektorat untuk memastikan proses pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan sesuai rekomendasi BPK.

-Perlu adanya punishment berupa penundaan hingga pencabutan reward upah pungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Dilakukan rekonstruksi dan re-evaluasi terhadap system IT untuk memastikan efektifitas layanan sesuai dengan rekomendasi BPK.

-Dilakukan reward dalam bentuk penghargaan bagi wajib pajak dan retribusi yang melakukan kewajibannya tepat waktu.

-Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan DPRD, Badan Anggaran mendorong agar Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi membuka dan memberikan akses terhadap sistem pendapatan daerah yang ada kepada DPRD Kota Bekasi secara on-line.

-Pemerintah Kota Bekasi agar melakukan perbaikan terhadap Aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah sesuai dengan rekomendasi dari BPK dan bisa dipastikan tenggat waktu atas perbaikan sistem yang ada, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- Memvalidasi hasil perbaikan aplikasi tersebut oleh pihak yang berkompeten.
 - Memberikan pelatihan / sosialisasi atas perubahan / perbaikan sistem tersebut kepada para user.
 - Memastikan efektifitas hasil tindakan yang dilakukan pada poin (b) di atas (pelatihan/sosialisasi dan sebagainya).
 - Meng update / memperbaharui SOP terkait, akibat perubahan / penyempurnaan sistem tersebut.
- DPMTSP meningkatkan



Paripurna Laporan Reses I Tahun 2021 DPRD Kota Bekasi, Kamis 18 Maret 2021.

sistem yang terintegrasi dengan Bapenda dalam perihal pendapatan daerah dapat termonitoring secara real time.

Untuk mengejar optimalisasi PAD dari sektor PBB dan IMB, agar dilakukan terobosan dan perubahan yang memudahkan masyarakat serta mengatasi faktor hambatan dalam ketidaktercapaian target PAD dengan sistem on-line.

Bapenda agar menyiapkan pelayanan PBB yang bersifat mobile, sehingga bisa lebih efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga lebih banyak potensi PAD yang masuk, dan pemberian insentif atau upah pungut bagi petugas kelurahan dan kecamatan yang melakukan pemungutan langsung PBB.

Badan Anggaran DPRD mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk memaksimalkan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, terkait penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kota Bekasi agar melakukan pembagian otorisasi dalam memonitor sistem Pendapatan Daerah, sehingga bisa mengantisipasi penyimpangan sesuai dengan rekomendasi dari BPK.

Bapenda agar melakukan sinkronisasi data dan optimalisasi sistem pelay-

anan on-line berbasis IT yang komperhensif dan real time dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada lagi pelayanan manual/off line.

DPRD Kota Bekasi mendorong dinas terkait agar segera melakukan perbaikan terhadap masih adanya loss potensi PAD dengan membangun sistem terintegrasi.

Inspektorat Kota Bekasi agar menjalankan peran yang sangat strategis dalam membantu pengawasan DPRD, untuk secara rutin menyampaikan hasil review atas Pendapatan Daerah.

Bapenda harus melakukan pemutakhiran data wajib pajak (SPPT) khususnya SPPT yang sudah dipecah dari SPPT induknya secara komperhensif, agar tidak terjadi double kewajiban pembayaran terhadap wajib pajak.

Selain itu, dalam rangka Rapat Paripurna Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Dr. H. Moh Ridwan, MM menyampaikan Laporan Hasil Reses I Tahun 2021

Hasil di pelaksanaan reses, kata Ridwan, berupa masukan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dari kegiatan reses yang dicatat oleh anggota DPRD sesuai daerah pemilihannya yang kemudian dihimpun oleh Sekretariat DPRD dan dilaporkan kepada Pimpinan

DPRD sebagai dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

“Dengan aspirasi yang masuk akan dijadikan bahan dalam setiap pembuatan Raperda yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan aspirasi yang masuk berupa usulan pembangunan fisik dan kegiatan lainnya akan diakomodir dalam penyusunan RKPD Kota Bekasi yang selanjutnya sebagai bahan untuk penyusunan APBD baik dalam perubahan maupun dalam penyusunan APBD tahun anggaran yang akan datang,” imbuhnya.

Ridwan juga menyampaikan, ada 2930 aspirasi hasil dari reses I 2021 dan aspirasi masyarakat hasil reses yang diterima oleh Anggota DPRD untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Bekasi dan secara umum aspirasi masyarakat dari beberapa Daerah Pemilihan sudah terungkap dalam Reses DPRD menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dan sebagai masukan dalam penyusunan APBD Kota Bekasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro, B.Eng, M.Si tersebut dilaksanakan dengan mematuhi protap kesehatan dan dilaksanakan semi virtual dan live streaming (ADV)



PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

SU 01019
TELEPON KE LUAR NEGERI LANGSUNG DARI PONSEL

Telepon Hemat Ke Luar Negeri
Suara Jernih ngobrol pun nyaman

Cuma Rp 6an-/detik

Tekan Kode Akses 01019
TELKOMSEL dan XL

01019 Kode negara Kode area No Telepon yang dituju OK/Yes

Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxx

Customer Service : 021-634 5009
Mobile : 0811 17 50 291-95
SMS : 0811 17 50 369
E-mail : support@gaharu.co.id

BAHARU
www.gaharu.co.id

Beli Saham Freeport Rp53 T, Indonesia Balik Modal 2025

JAKARTA (IM) - Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak memastikan Indonesia bakal balik modal pada 2025 dari hasil pembelian 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) senilai US\$3,85 miliar atau Rp53,9 triliun (kurs Rp14.000).

“Dari modal yang kita keluarkan US\$3,85 miliar itu diterima kembali kalau total absolut saja itu sampai 2025 sudah kembali,” kata Orias dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (31/3).

Berdasarkan perhitungan konservatif, dia menjelaskan bahwa Indonesia akan mendapatkan pemasukan dari PTFI sebesar US\$200 juta di 2021, US\$400 juta di 2022, US\$1 miliar di 2023, US\$1,5 miliar di 2024 dan US\$1,5 miliar di 2025.

Bahkan, bagian yang diterima Indonesia bisa lebih

besar dari itu. Sebab, perhitungan di atas menggunakan asumsi harga copper (tembaga) di US\$ 2,75 per pound. Sementara posisi riil saat ini adalah US\$4 per pound.

“Jadi kita sangat optimis bahwa angka (bagian yang diterima Indonesia) itu sebenarnya bisa lebih. Itu angka konservatif. Kalau toh dia meleset ke 2026 pun tidak apa-apa bahwa itu akan balik (balik modal). Tapi hitungan kami 2025 itu akan kembali,” tambah Orias.

Ia juga memaparkan ada tawaran dari perusahaan RRT, Tsingshan untuk membangun smelter di Halmahera, Maluku Utara untuk fasilitas pemurnian hasil tambang Freeport Indonesia.

“Kami mendapatkan tawaran juga dari pihak lain dalam hal ini dari pihak Tsingshan untuk ada alternatif untuk ke Halmahera,” ujarnya. • pan

13 Proyek Rp168 Triliun Dilelang Tahun Ini

JAKARTA (IM) - Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut sebanyak 13 proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) siap dilelang tahun ini.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan proyek yang siap dilelang itu terdiri dari 12 jalan dan jembatan, serta 1 perumahan. Nilai investasi sekitar Rp 168,84 triliun.

“Proyek KPBU yang ready to offer di tahun 2021 yang sudah masuk daftar rencana KPBU ada 12 terkait dengan jalan dan jembatan. Dan satu dari sektor perumahan ada proyek rumah susun Cisaranten Bina Harapan,” ucap Eko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (31/3).

Daftar proyek yang siap dilelang itu adalah Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg, Jembatan Batam - Bintan, Tol Mamminasata, Tol Sentul Selatan - Karawang Barat, Tol Bogor - Serpong via Parung, Tol Gilimanuk - Mengwi (PQ), penggantian dan/atau duplikasi Jembatan Calendar Hamilton (CH) di Pulau Jawa (PQ), Tol Akses Patimban, Tol Semanan - Balaraja, Tol Semarang Harbour/Sema-

rang Kendal, Tol Cikunir - Karawaci Elevated, Tol JORR Elevated Ruas Cikunir - Ulu-jami, Rusun Cisaranten, Bina Harapan, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ir. H. Djuanda.

Lalu, ada 13 proyek lagi yang sedang diusulkan untuk KPBU. Proyek-proyek tersebut di antaranya Jalan Tol Cilacap - Yogyakarta, Tol Demak - Tuban, Tol Jember Lumajang, Tol Ngawi - Bojonegoro - Babat, Tol Jember - Situbondo, Tol Tulungagung - Kepanjen, dan Jembatan Muna - Buton.

Sementara, proyek KPBU yang masih dalam tahap persiapan Tahun Anggaran (TA) 2021 atau kelayakan studi (Feasibility studies) terbagi menjadi dua. Pertama, terkait Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outline Business Case (OBC) terdapat lima proyek ruas jalan dan jembatan, dua proyek sumber daya air (SDA), enam proyek perumahan dan lima proyek permukiman.

Kelima proyek ruas jalan dan jembatan tersebut Jalan Bebas Hambatan Non Tol Lingkar Luar IKN, KM 13 Outer Ringroad IKN, Jalan Akses Exit Toll, Tol Lingkar Selatan Bandung, dan Tol Pelikasi Jembatan Calendar Hamilton (CH) di Pulau Jawa (PQ), Tol Akses Patimban, Tol Semanan - Balaraja, Tol Semarang Harbour/Sema-